**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Konsep Pendidikan Non Formal**

Kehidupan suatu bangsa erat sekali kaitannya dengan tingkat pendidikan. Pendidikan bukan hanya sekedar mengawetkan budaya dan meneruskannya dari generasi ke generasi, akan tetapi juga diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan pengetahuan. Pendidikan bukan hanya menyampaikan keterampilan yang sudah dikenal, tetapi harus dapat meramalkan berbagai jenis keterampilan dan kemahiran yang akan datang, dan sekaligus menemukan cara yang tepat dan cepat supaya dapat dikuasai oleh anak didik.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Dari kutipan pasal tersebut, berarti setiap warga Negara berhak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahtraan kehidupannya, dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat membelajarkan warga masyarakat dari berbagai lapisan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003; mendefenisikan sebagai:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

6

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia-manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, terampil serta berkepribadian dan dapat berprilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Hal ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas manusia yang baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat.

Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, pemerintah menyelenggarakan program pendidikan nasional yang dilaksanakan melalui tiga jalur pendidikan yaitu jalur Pendidikan Formal, jalur Pendidikan Informal, dan jalur Pendidikan Nonformal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Selanjutnya dalam Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 ditegaskan bahwa, “pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Menurut Sihombing (2000:12) pendidikan nonformal adalah “suatu proses pendidikan yang sasaran, pendekatan, dan keluarannya berbeda dengan pendidikan sekolah, dan bukan merupakan pendidikan sekolah yang dilakukan di luar waktu sekolah”. Sedangkan menurut Amri (2008:2) pendidikan nonformal adalah “setiap aktifitas yang dilakukan secara teratur, terorganisir yang berlangsung di luar sistem persekolahan atau pendidikan formal”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar pendidikan formal yang dilakukan secara teratur dan terorganisir.

1. **Konsep Pendidikan Keaksaraan Fungsional**
2. Pengertian Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Program pendidikan keaksaraan fungsional dikembangkan untuk memberi layanan pendidikan bagi penyandang buta aksara sehingga masyarakat melek aksara.Menurut Napitupulu (Kusnadi, 2004: 53) keaksaraan didefinisikan secara luas sebagai “pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan noleh warga belajar yang dapat merubah kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang bersifat fungsional bagi kehidupannya”.Sedangkan menurut Kusnadi (2005:79) keaksaraan fungsional adalah “kemampuan untuk dapat mengatasi suatu kondisi baruu yang telahh tercipta oleh lingkungan masyarakat, agar warga belajar dapat memiliki kemampuan fungsional (berfungsi bagi diri sendiri dan masyarakat)”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Keaksaraan Fungsional adalah sebuah usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar mampu menulis, membaca dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan mutu dan taraf hidupnya. Prioritas usia penyandang buta aksara berusia 15-50 tahun pada pemberantasan buta aksara melalui program keaksaraan fungsional. Buta aksara adalah orang yang tidak memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Program keaksaraan, atau yang dahulu dikenal dengan program pemberantasan buta huruf, selalu ada di negara mana pun, termasuk negara adidaya sekalipun, meskipun bentuk dan kriterianya berbeda. Di Indonesia, orang dikatakan buta huruf jika tidak dapat membaca serangkaian huruf menjadi kalimat beserta artinya.

Pemberantasan buta aksara memiliki tahapan, yaitu tahap keaksaraan dasar dan tahap keaksaraan mandiri. Tahap keaksaraan dasar adalah warga belajar yang belum memiliki pengetahuan dasar tentang calistung (baca tulis hitung) tetapi telah memiliki pengalaman yang dapat dijadikan kegiatan pembelajaran. Terakhir, tahap keaksaraan mandiri adalah warga belajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman. Pada hasil belajarnya, warga belajar diharapkan dapat menganalisa dan memecahkan masalah dalam rangka untuk meningkatkan mutu taraf hidupnya.

1. Fungsi dan Tujuan

Menurut Histato (2010:24) fungsi dari Keaksaraan Fungsional adalah “untuk memberikan pengetahuan bagi warga belajar mengenai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta pengetahuan yang bersifat fungsional yang merupakan alat untuk meningkatkan taraf kehidupan warga belajar”. Sedangkan tujuannya adalah :

1. Mengembangkan kemampuan calistung dengan menekankan pada kemampuan menulis, membaca aktif dan berhitung.
2. Menekankan keterlibatan warga belajar secara aktif dan kreatif.
3. Membangun pengetahuan, pengalaman, dengan memperhatikan tradisi lisan warga belajar (bahasa ibu) dan keaksaraan lain.
4. Dalam belajar mengutamakan pada bahan belajar yang digali lingkungan hidup warga belajar yang memiliki karakteristik beragam.
5. Proses belajar harus didesain agar responsif dan relevan dengan konteks sosial-ksultural warga belajar.

Dari pendapat di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi keaksaraan fungsional mengembangkan kemampuan dasar manusia yang meliputi kemampuan membaca, menulis dan berhitung yang bersifat fungsional dalam meningkatkan mutu dan taraf kehidupan dan masyarakatnya. Sedangkan tujuan sdari program keaksaraan fungsional adalah membelajarkan warga belajar agar dapat memanfaatkan kemampuan dasar baca, tulis, dan hitung (calistung) dan kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Strategi Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional

Keaksaraan Fungsional pada hakikatnya merupakan suatu program pemerintah dalam mengatasi buta huruf atau meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pendapat Kusnadi (2005:77) sebagai berikut:

Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Luar Sekolah bagi masyarakat yang belum dan ingin memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung (Calistung), dan setelah mengikuti program ini (hasil belajarnya) mereka memiliki kemampuan “baca-tulis-hitung” dan menggunakannya serta fungsi kehidupannya. Artinya mereka tidak hanya memiliki kemampuan calistung dan keterampilan berusaha atau bermata pencaharian saja, tetapi juga dapat survive dalam kehidupannya.

Dalam penyelenggaraan program keaksaraan fungsional agar dapat dikembangkan dan memotivasi serta memberdayakan warga masyarakat yang menjadi sasaran didiknya, sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masing-masing, maka menurut pendapat Kusnadi (2005:192) terdapat beberapa strategi yang perlu di perhatikan dalam penyelenggaraan program fungsional, yaitu : “a) konteks lokal, b) desain lokal, c) proses partisipasif, dan d) fungsionalisasi hasil belajar”.

Dari keempat strategi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Konteks Lokal

Keaksaraan Fungsional harus mengacu pada konteks lokal dan kebutuhan setiap warga belajar maka bahan belajar harus bermanfaat bagi kehidupan warga belajar sehari-hari. Keaksaraan fungsional mengacu pada pemanfaatan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung setiap individu guna memecahkan masalah serta melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pendidikan keaksaraan fungsional harus dilakukan survei tentang kebutuhan keaksaraan setempat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui peluang atau kesempatan dan kendala yang dihadapi warga belajar dalam kehidupan sehari-hari.

1. Desain Lokal

Karena konteks lokal mendefinisikan adanya kebutuhan dan peluang bagi penyelenggaraan program keaksaraan fungsional, pihak-pihak yang terlibat dalam program ini harus mampu membuat desain lokal kekasaraan, karena program ini dirancang berdasarkan model-model keaksaraan sebagai respon pada kebutuhan, minat, kenyataan dan sumber-sumber setempat.

1. Proses Partisipasif

Proses partisipasif merupakan usaha perlibatan warga belajar untuk berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi ataupun tindak lanjut. Pihak – pihak yang terlibat harus diikut sertakan sejak awal mendesain program sampai evaluasi, termasuk warga belajar, narasumber, dan penyelenggara serta organisasi/lembaga terkait harus ada interaksi secara aktif diantara mereka.

1. Fungsionalisasi Hasil Belajar

Pendidikan Keaksaraan harus memberikan manfaat dan makna yang berkaitan secara langsung dengan lingkungan hidup, mata pencaharian dan situasi keluarga sehingga hasil belajar yang dicapai warga belajar memberi manfaat bagi peningkatan mutu kehidupannya. Kriteria dalam menentukan keberhasilan program keaksaraan fungsional adalah dengan cara mengukur kemampuan dan keterampilan setiap warga belajar dalam memanfaatkan dan memfungsikan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari, yang meliputi membaca, menulis, dan berhitung guna peningkatan mutu taraf kehidupan warga belajar.

1. Proses pembelajaran keaksaraan fungsional

Apabila kita perhatikan apa dan bagaimana kejadian pembelajaran melalui jalur pendidikan luar sekolah, akan jelas kita lihat ada 10 unsur (patokan) yang akan selalu ada pada setiap program (Iskandar : 1989). Kesepuluh patokan tersebut adalah : “warga belajar, sumber belajar, pamong belajar, sarana belajar, tempat belajar, dana belajar, rajin belajar, kelompok belajar, program belajar dan hasil belajar”. Kesepuluh unsur tersebut di satu sisi menjadi bagian yang mendukung program pembelajaran namun di sisi lain dapat digunakan menjadi dasar untuk menentukan patokan, ukuran atau standard penilaian untuk melihat sejauh mana pembelajaran mencapai tujuan yang diinginkan, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

1. Warga belajar adalah anggota masyarakat yang ikut dalam satu kegiatan pembelajaran. Tidak digunakan istilah peserta didik murid, siswa, karena istilah ini memiliki konotasi bahwa anggota masyarakat tersebut sebatas penerima tidak menjadi pemilik dan penentu, kurang kelihatan aspek keterlibatan; sedang dalam kegiatan PLS, warga belajar turut aktif menentukan apa yang diinginkannya untuk dipelajari. Istilah warga menunjukkan bahwa anggota masyarakat tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran.
2. Sumber belajar adalah warga masyarakat yang memiliki kelebihan baik di bidang pengetahuan, keterampilan, sikap dan mampu serta mau mengalihkan apa yang dimilikinya pada warga belajar melalui proses pembelajaran. Sumber belajar adalah orang yang merasa bertanggungjawab untuk meningkatkan kemampuan manusia yang ada di lingkungannya. Mereka adalah manusia yang tidak masa bodoh dengan kebodohan.

Sumber belajar bukan hanya mereka yang memiliki ijazah pada tingkat pendidikan sekolah tertentu, mereka yang tidak sekolah sekalipun, tetapi memiliki keunggulan dan mau membagi keunggulan tersebut pada orang lain dapat menjadi sumber belajar. Sumber belajar disebut juga dengan panggilan tutor, narasumber teknis.

1. Pamong belajar adalah tokoh masyarakat yang mampu dan mau membina, membimbing, mengarahkan dan mengorganisir program pembelajaran masyarakat di sekitarnya. Pamong belajar yang akan menjamin terjadinya proses pembelajaran bagi warga belajar rang telah memutuskan untuk ikut pada program tertentu. Pamong belajar bertempat tinggal di sekitar warga belajar sehingga mereka mudah berkomunikasi dan saling mendukung; Pamong belajar bukan petugas struktural pemerintahan, tetapi petugas yang diterima oleh warga belajar sebagai pembimbing mereka.
2. Sarana belajar adalah bahan dan alat yang ada di lingkungan masyarakat, yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Sarana belajar dalam wujudnya dapat berbentuk buku, lembaran, bangunan, kekayaan alam, hewan, tumbuhan dan apa saja yang apabila dipelajari dapat menambah, meningkatkan wawasan dan pengetahuan warga belajar.
3. Tempat belajar adalah tempat di mana dimungkinkan terjadi proses pembelajaran; Dapat berwujud rumah, tempat pertemuan, tempat beribadah, balai desa, atau bangunan yang tidak digunakan lagi namun masih memungkinkan digunakan. Pembelajaran dapat terjadi dimana saja, sepanjang warga belajar, sumber belajar dan pamong belajar menganggap tempat itu sesuai untuk mendukung pencapaian hasil belajar yang diinginkan. Tempat belajar juga dapat berbentuk lapangan, tempat bersejarah. Karena itulah dikatakan bahwa PLS tidak menuntut gedung, tetapi kesempatan untuk menjamin terjadinya proses pembelajaran.
4. Dana belajar adalah uang atau materi lainnya yang dapat diuangkan dalam menunjang pelaksanaan program pembelajaran yang telah disusun oleh pamong belajar bersama sumber belajar dan warga belajar. Dana belajar dapat bersumber dari pemerintah, tokoh masyarakat, pengusaha di lingkungan dimana warga belajar tinggal, maupun yang bersumber dari warga belajar sendiri ataupun dari warga masyarakat secara umum.
5. Ragi belajar adalah rangsangan yang mampu membangkitkan semangat belajar warga belajar, sehingga proses pembelajaran terjadi; Terjadi tanpa paksaan, gertakan tetapi karena kesadaran warga belajar serta kekuatan sang ada pada ragi belajar itu sendiri. Ragi belajar merupakan kekuatan yang dahsyat baik yang bersumber dari luar diri warga belajar maupun yang sebenarnya ada dalam diri warga belajar yang menyebabkan warga belajar menjadi senang, gembira dan gigih untuk terus belajar.

Ragi inilah yang menyebabkan proses pembelajaran terus berjalan sampai tujuan tercapai.

1. Kelompok belajar adalah sejumlah warga belajar yang terdiri dari 5-10 orang, yang berkumpul dalam satu kelompok, memiliki tujuan dan kebutuhan belajar yang sama, dan bersepakat untuk saling membelajarkan. Kelompok inilah bersama sumber belajar dan pamong belajar yang menentukan tempat dan waktu belajar. Kelompok belajar adalah organ yang dinamis dan partisipatif.
2. Program belajar adalah serangkaian kegiatan yang mencerminkan tujuan, isi pembelajaran, cara pembelajaran, waktu pembelajaran, atau sering disebut dengan garis besar kegiatan belajar. Program belajar disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar. Sehingga warga belajar menjadi pemilik dari program tersebut. Program pembelajaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan warga belajar akan menyebabkan warga belajar jenuh dan meninggalkan program. Program belajar tidak diatur, dipaksakan oleh orang lain, tetapi tumbuh dari keinginan dan kebutuhan warga belajar. Untuk menjamin mutu setiap program disusun acuan terendah yang harus dicapai setelah menyelesaikan program.
3. Hasil belajar adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dikuasai warga belajar setelah proses pembelajaran tertentu dilalui dalam kurun waktu tertentu. Kebermaknaan hasil belajar bagi peningkatan mutu hidup dan kehidupan warga belajar menjadi patokan keberhasilan. Hasil belajar yang segera dapat memperbaiki kehidupan warga belajar, merupakan ragi belajar untuk proses lebih lanjut. Belajar hanya untuk tahu akan kurang bermakna bagi warga belajar.
4. Langkah-langkah Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
5. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan pada pembelajaran keaksaraan fungsional berarti menentukan tujuan yang harus dicapai, menetukan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung tujuan KF tersebut, menentukan tenaga dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat oleh penyeleenggaraa KF. Rencana yang disusun dengan harapan agar tercipta situasi yang memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan kemajuan yang ada diluar lingkungannya serta membuka peluang untuk memiliki mata pencaharian yang lebih baik bagi warga belajar.

Menurut Slamet (2011) tahap perencanaan yang dilakukan oleh pengelola dan tutor sebelum pembelajaran keaksaraan fungsional dilaksanakan berbagai kegiatan berupa :

1. Survei lokasi, untuk mengetahui lokasi yang tepat dalam menyelenggaraakan program ini dan terdapat banyak calon warga belajar yang belum memiliki kemampuan baca, tulis, dan berhitung.
2. Identifikasi atau pendataan terhadap calon warga belajar untuk mengetahui calon warga belajar yang memang buta aksara murni ataupun calon warga belajar yang mengikuti pembelajaran ini akan tetapi tidak ada tindak lanjut dan mereka kurang memiliki minat untuk belajar secara sendiri.
3. Menyiapkan tempat dan bahan belajar, sarana dan prasarana termasuk diantaranya gedung atau ruangan dan alat tulis menulis yang dapat menunjang kelancaran proses belajar mengajar warga belajar yang mengikuti program pembelajaran.
4. Mengelompokkan warga belajar, untuk lebih mengefektifkan proses pembelajaran buta aksara jika mempunyai calon warga belajar yang cukup banyak maka dapat di kelompookan ke dalam beberapa kelompok belajar.
5. Menyusun program belajar, dalam menyusun sebuah program belajar sama halnya membuat agenda belajar, seperti materi belajar, jadwal belajar, dan sebagai tutor juga perlu menyusun yang namanya metode mengajar. Berikut uraiannya :

Materi belajar : materi belejar ini meliputi teori keterampilan yang dalam hal ini materinya terkait dengan membaca, menulis, dan berhitung.

Jadwal belajar : jadwal pembelajaran yang di lakukan yaitu 4 kali seminggu yang dilaksanakan pada siang hari.

Ragi belajar : untuk mengingatkan warga belajar untuk rajin datang belajar, mengingatkan kepada warga belajar mempelajari apa yang telah dipelajari dan memberikan nilai yang kepada warga belajar yang berprestasi baik.

1. Media dan alat pembelajaran : menyiapkan media dan alat belajar yang akan di berikan keapda warga belajar sesuai dengan topik atau materi yang akan dibahas.
2. Melakukan proses administrasi, untuk mengetahui tingkat partisipasi serta kehadiran warga belajar serta faktor – faktor yang mempengaruhinya selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Hal ini dilakukan catatan absensi kehadiran, partisipasi, dan kedisiplinan.
3. Tahap Pelaksanaan
4. Kontrak belajar : kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar jika tutor dengan warga belajar membuat kesepakatan kegiatan pembelajaran yang akan dilakasanakan.
5. Kesepakatan belajar : suatu kegiatan yang yang dirumuskan secara bersama – sama ( didiskusikan secara bersama – sama) yang ingin digunakan sebagai bahan bacaan, waktu belajar, dan tempat belajar.
6. Menyiapkan instrumen administrasi dalam mendukung ketercapaian pembelajaran, yang dimana setelah dilakukan pembelajaran tersebut maka tutor melakukan pencatatan seperti absensi warga belajar, selain itu juga perlu dibuatkan instrumen pengukur kemajuan dan keberhasilan belajar.
7. Melaksanakan kegiatan pembelajaran

Dalam melaksanakan pembelajaran keaksaraan fungsional perlu ditentukan adanya kesepakatan belajar agar pembelajaran tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar.

1. Tahap Penilaian
2. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta didik dalam hal mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tulis, hasil karya, portofolio (kumpulan kerja) dan penugasan. Penilaian akhir dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik terhadap standar kompetensi KF yang harus diselesaikan selama mengikuti program.
3. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan sudah lulus/selesai dan diberikan Surat Tanda Selesai Belajar (STSB).
4. Tindak Lanjut dilakukan melalui proses pemantauan/control dan pembelajaran lanjutan. Adapun penjelasan mengenai hal tersebut, yaitu : setelah dilakukan tahap evaluasi maka perlu dilihat apakah dalampelaksanaan pembelajaran keaksaraan fungsional dilakukan tahap pemantauan/control dan pembelajaran lanjutan atau tidak, dengan tujuan untuk melihat sejauh mana tingkat keberhasilan pembelajaran KF itu sendiri.
5. **Konsep Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**

Sihombing (1999:104) menjelaskan bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagkan pusat kegiatan belajar masyarakat, akan banyak potensi yang selama ini tidak tergali menjadi akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan-pendekatan kultural dan persuasif. Pusat kegiatan belajar masyarakat diharapkan dapat menjadi sentra seluruh kegiatan pembelajaran masyarakat, kemandirian dan kehandalannya perlu dijamin oleh semua pihak.

**Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan suatu wadah berbagai kegiatan pembelajaran masyarakat diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya.**

Untuk mendirikan PKBM bisa dari unsur apapun oleh siapapun yang tentunya telah memenuhi syarat – syarat kelembagaan antara lain : Akta Notaris, Susunan Badan pengurus, Sekretariat, dan ijin operasinal dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.

Sihombing (1999:104) **Tujuan dari PKBM yaitu mendekatkan wadah di mana masyarakat dapat menimba ilmu yang diperlukan, memadukan program pembelajaran dengan tuntutan lingkungan, memudahkan pengendalian masyarakat terhadap kualitas pendidikan bagi warganya.**

Program-program yang diselenggarakan di PKBM dapat sangat beragam dan dapat juga tak terbatas, namun harus sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masyarakat di mana PKBM itu berada atau dikatakan yang relevan, serta program-program itu harus bermakna dan bermanfaat﻿. Program-program tersebut umumnya antara lain :

1. Pendidikan Kesetaraan : Paket A, Paket B dan Paket C.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Pendidikan Keaksaraan Fungsional/KF (bagi Buta Aksara)
4. Taman Bacaan Masyarakat (TBM)
5. Pendidikan Keterampilan, Kecakapan Hidup (*life skill*) dan Kursus-kursus.
6. Pendidikan Kewarganegaraan, Kerumahtanggaan dan Keorangtuaan (*parenting*)
7. Pendidikan Mental dan Spiritual-Religius / Keagamaan
8. Pendidikan Kewirausahaan, Usaha Produktif Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha (KBU dan KUBE)
9. Pendidikan Seni, Budaya dan Olah Raga
10. Pendidikan Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan, Penyuluhan Pertanian, Peternakan dan Perikanan
11. Pendidikan Kesehatan Masyarakat

.

1. **Kerangka Pikir**

Keaksaraan Fungsional merupakan program pendidikan luar sekolah (pendidikan nonformal) yang menganut prinsip belajar sepanjang hayat dengan tujuan pembentukan karakter dan jati diri sehingga mereka yang belum memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung dapat shidup secara mandiri dengan bekal pengetahuan untuk menghadapi realitas kehidupan serta memiliki bekal untuk mengaktualisasikan diri agar bisa hidup secara mandiri ditengah – tengah masyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan Fungsional untuk masyarakat yang buta aksara di laksanakan sesuai dengan kesepakatan tutor dan warga belajar di PKBM Mabbarakka Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru. Manfaat lain yang dirasakan oleh masyarakat adalah dapat mengubah kehidupan mereka utamanya dari segi mata pencaharian yang mampu memperbaiki sistem perekonomiannya dalam keluarganya.

Sihombing (1999:104) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagkan pusat kegiatan belajar masyarakat, akan banyak potensi yang selama ini tidak tergali menjadi akan dapat digali, ditumbuhkan, dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan-pendekatan kultural dan persuasif.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah tempat pembelajaran dalam bentuk berbagai macam keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan segala potensi yang ada di sekitar lingkungan kehidupan masyarakat, agar masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki taraf hidupnya.

Kelompok belajar Keaksaraan Fungsional di PKBM Mabbarakka Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru merupakan program pendidikan yang bersifat empirik karena dilaksanakan dengan menggunakan pembinaan baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan terhadap masyarakat dengan berbagai jenis program seperti keaksaraan fungsional dan keaksaraan usaha mandiri. Kerangka pikir tentang penyelenggaraan program pendidikan Keaksaraan Fungsional di PKBM Mabbarakka Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dapat digambarkan sebagai berikut :

Bebas Buta Aksara oleh PKBM

Pelaksanaan Pembelajaran Keakasaraan

Tindak Lanjut

Evaluasi

Pelaksanaan

Perencanaan

1. Melakukan penilaian pada warga belajar
2. Memberikan ujian akhir pada akhir pembelajaran
3. Menyusun Kotrak atau kesepakatan belajar
4. Menyiapkan instrumen administrasi belajar
5. Melaksanakan kegiatan belajar
6. Survei lokasi
7. Pendataan atau identifikasi kebutuhan belajar
8. Mengelompokkan warga belajar
9. Menyiapkan tempat dan bahan belajar
10. Menyusun program belajar
11. Menyiapkan media dan alat belajar
12. Melakukan proses administrasi
13. Pemantauan/kontrol
14. Pembelajaran lanjutan

Gambar 2.1: skema kerangka pikir

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat dikatakan bahwa dengan penyelenggaraan keaksaraan fungsional yang sesuai dengan seharusnya mampu memberikan kontribusi yang positif dalam upaya mengurangi jumlah buta aksara.